

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI  
KABUPATEN BARRU**

**SKRIPSI**



Oleh

**KHAIRUNNISA N  
NIM 105711101416**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2021**

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI  
KABUPATEN BARRU**

**SKRIPSI**

**OLEH  
KHAIRUNNISA N  
NIM 105711101416**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jl. S. R. P. 100  
Makassar

29/01/2021

1 exp  
Smb. Alumni

R/0006/199/21 co  
KHA  
k

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak Nasrullah dan Ibu Hj Suriani, yang telah mengiringi langkah saya dan senantiasa selalu memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga. Dan kepada Diri sendiri terima kasih karena telah berjuang dan tak pernah memutuskan untuk menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.

### MOTTO

“Kita tak akan pernah cukup untuk semua orang. Permintaan dan tuntutan dari luar tak bisa selamanya sejalan dengan apa atau siapa diri kita. Kalau kita hidup untuk memenuhi itu saja, pantas segala hal terasa kurang”

“Hiduplah untuk dirimu sendiri, untuk kebahagiaanmu, dan untuk orang-orang yang ikut andil dalam hidupmu. Sadari keterbatasan diri, dan jalani sesuai yang kamu mampu. Dengan itu, baru akhirnya manusia bisa tumbuh dan penuh, oleh sebab itu tak harus jadi sempurna untuk jadi berguna”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru"  
Nama Mahasiswa : Khairunnisa N  
No. Stambuk/NIM : 105711101416  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Manyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diajukan di  
depan penitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi  
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021.

Makassar, 20 Januari 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Asriati, SE., M.Si**  
NIDN : 003112630

  
**Muhammad Nur Abdi, SE., MM**  
NIDN : 0907018605

Diketahui Oleh:

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan

  
**Ismar Kasuleng, SE., MM.**  
NBM : 005078

  
**Hi. Naidah, SE., M.Si**  
NBM : 710551



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Khairunnisa N, NIM : 105711101416, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/60201/091004/2021 tanggal 02 Jumadil akhir 1442 H / 15 Januari 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Jumadil Akhir 1442 H

15 Januari 2021

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM  
2. Hj. Naidah, SE., M.Si  
3. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
4. A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Ditandatangani Oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NIM. 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairunnisa N  
Stambuk : 105711101416  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru.

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**Khairunnisa N**  
**NIM : 10571110216**

Diketahui Oleh :



Ketua Program Studi,

**Hj. Naidah, SE., M.Si**  
**NBM : 710551**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Nasrullah dan Ibu Hj. Suriani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari pihak-pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II,

III dan IV Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si, selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asdar, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Asriati SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
6. Bapak Muhammad Nur Abdi, SE., MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan membantu selama dalam proses penyusunan skripsi hingga ujian akhir.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Untuk Bapak dan Ibu selaku staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, terima kasih telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
11. Nur Ainun Warda, Masni, Eliza Agustina, Kasmitatul Hakmi atas persahabatan yang suportif, semangat yang luar biasa dan selalu menjadi teman berproses

sejak awal perkuliahan hingga saat ini.

12. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis mampu merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 20 Januari 2021

Penulis

Khairunnisa N

## ABSTRAK

**Khairunnisa N, 2021.** Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru. Skripsi Program Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Asriati, dan pembimbing II Muhammad Nur Abdi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyajikan data mengenai data retribusi pasar dan data pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Barru selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2015-2019 adalah tidak berhasil dan kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) selama periode tersebut masih kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan pemerintah khususnya kolektor pasar belum maksimal dalam pengelolaan retribusi pasar. Ini dibuktikan bahwa adanya tunggakan pembayaran retribusi pasar yang dilakukan pedagang sehingga pemasukan pada kas daerah tidak efektif. Selain itu penyebab lainnya adalah banyaknya kios dan lapak yang kosong yang tidak berfungsi dengan baik dikarenakan pedagang tidak mampu membeli ataupun menyewa dengan alasan harga yang ditentukan terlalu mahal. dalam hal ini mengakibatkan penerimaan pendapatan asli daerah disektor retribusi pasar kurang berkontribusi.

**Kata kunci:** *Retribusi Pasar, Pendapatan asli daerah*

## ABSTRACT

**Khairunnisa N, 2021.** Contribution of Market Levies to Increasing Regional Original Income (PAD) in Barru Regency. Thesis Development Economics Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by first Advisor, Mrs. Asriati, and second advisor Mr. Muhammad Nur Abdi.

This study aims to determine the contribution of market levies to increasing local revenue (PAD) in Barru Regency. This type of research used in this research is quantitative descriptive research by presenting data on market retribution data and local revenue data.

The results of this study indicate that the growth rate of revenue from the Barru regency market retribution for the five fiscal years, namely from the 2015-2019 fiscal year was unsuccessful and the contribution of market levies to the increase in local revenue (PAD) during that period was still less contributing. This is because the government, especially market collectors, has not maximized the management of market charges. This is proven by the existence of arrears in the payment of market levies by traders so that the income in the regional treasury is not effective. In addition, another cause is the number of empty stalls and stalls that do not function properly because traders are unable to buy or rent because the price set is too expensive. In this case, the revenue from local revenue in the market retribution sector is less contributing.

**Keywords:** *Market Retribution, Regional original Income*

## DAFTAR ISI

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| SAMPUL .....                         | i         |
| HALAMAN JUDUL.....                   | ii        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....  | iii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....              | iv        |
| LEMBAR PENGESAHAN .....              | v         |
| LEMBAR PERNYATAAN .....              | vi        |
| KATA PENGANTAR.....                  | vii       |
| ABSTRAK.....                         | x         |
| ABSTRACT .....                       | xi        |
| DAFTAR ISI .....                     | xiii      |
| DAFTAR TABEL.....                    | xiv       |
| DAFTAR GAMBAR.....                   | xv        |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....              | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....             | 8         |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 8         |
| D. Manfaat Penelitian .....          | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b> | <b>10</b> |
| A. Tinjauan Teori .....              | 10        |
| B. Tinjauan Empiris .....            | 31        |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Kerangka Pikir.....   | 36        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>38</b> |
| A. Jenis penelitian .....  | 38        |
| B. Lokasi Penelitian.....  | 38        |
| C. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....                               | 38        |
| D. Jenis dan Sumber Data.....  | 39        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....  | 39        |
| F. Teknik Analisis Data.....   | 40        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                             | <b>42</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 42        |
| B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....   | 52        |
| C. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan.....                                     | 56        |
| 1. Mekanisme Penerimaan Retribusi Pasar.....                                   | 56        |
| 2. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar.....                                 | 64        |
| 3. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan asli daerah..... | 66        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>71</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 71        |
| B. Saran.....  | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>73</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>   |           |
| <b>BIOGRAFI PENULIS</b>  |           |

disebabkan karena perbedaan kesiapan masing-masing daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah tersebut.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004), yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Hohakay, et al. 2015).

Dengan pemberian otonomi kepada daerah tersebut, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab serta mampu meningkatkan daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, akan dengan mudah memahami kebutuhan daerahnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan suatu kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Dengan segala kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kaitannya dalam pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif di samping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan pertanggung jawaban keuangan daerah, pengertian pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh

daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2015 sampai dengan 2019.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Barru Tahun 2015-2019**

| Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah |                    |
|----------------|------------------------|--------------------|
|                | Target (RP)            | Realisasi (RP)     |
| 2015           | 66.747.068.173.91      | 74.239.999.181.94  |
| 2016           | 66.962.354.751.72      | 59.966.015.086.73  |
| 2017           | 115.531.919.805.00     | 130.717.794.632.70 |
| 2018           | 114.950.470.728.00     | 104.627.706.924.57 |
| 2019           | 110.310.167.038.00     | 103.887.386.166.26 |

Sumber: BAPENDA Kabupaten Barru (Diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Barru pada tahun 2015 sebesar 111,23% kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 89,55% pada tahun 2017 naik sebesar 113,14% pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 91,02% dan pada tahun 2019 naik sebesar 94,18%.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang bersal dari retribusi daerah harus dipungut atau dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas

penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. berdasarkan undang-undang No. 34 tahun 2000 pasal 18 tentang obyek dan golongan retribusi yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

Pemungutan retribusi ini diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah melalui potensi-potensi retribusi daerah yang ada, guna meningkatkan mutu serta jenis pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga upaya ini akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Barru terus menggali potensi dan sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah sebagai modal pembangunan daerah. Sumber penerimaan Kabupaten Barru yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pasar.

Retribusi menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Bentuk pemberian retribusi jasa umum

pemerintah kepada masyarakat adalah berupa jasa pelayanan umum. Salah satu bentuk retribusi jasa umum ini adalah retribusi jasa pelayanan pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dilakukan badan pengurus pasar kepada para pengguna fasilitas sarana dan prasarana pasar. Pemerintah daerah memungut retribusi tersebut kepada setiap pengguna sarana dan prasarana pasar, sedangkan dari pihak masyarakat/pedagang langsung mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang diberikan pemerintah daerah. Namun, Menurut informasi kepala BAPENDA Kabupaten Barru bahwa pendapatan retribusi di Kabupaten Barru masih sangat perlu diadakan pembedaan pelayanan pasar dan pendisiplinan staf pemungut retribusi untuk memperoleh hasil yang ditargetkan pemerintah kabupaten agar dapat terealisasi dengan baik. Berikut data dan target realisasi retribusi pasar tahun 2015 sampai dengan 2019.

**Tabel 1.2 Target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Barru tahun 2015-2019**

| Tahun Anggaran | Retribusi Pasar  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
|                | Target (RP)      | Realisasi (RP)   |
| 2015           | 1.400.000.000.00 | 1.242.966.900.00 |
| 2016           | 1.400.000.000.00 | 1.694.845.050.00 |
| 2017           | 1.876.053.050.00 | 1.996.368.800.00 |
| 2018           | 2.387.121.000.00 | 1.707.542.800.00 |
| 2019           | 2.467.385.000.00 | 1.695.399.950.00 |

Sumber : BAPENDA Kabupaten Barru (Diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi retribusi pasar pada tahun 2015 sebesar 88,78% kemudian pada tahun 2016 meningkat sebesar 121,06% pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 106,36% pada

tahun 2018 menurun sebesar 71,04% dan pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 66,71%.

Dalam sistem pemungutan retribusi pasar tersebut ada beberapa staf yang bertugas untuk mengatur dan mengelola manajemen setiap pasar, yang terdiri dari pejabat fungsional yang diangkat sebagai kepala pasar yang masing-masing mempunyai beberapa pegawai PNS serta staf pegawai sosial disetiap pasar. Terkhusus mengenai masalah pemungutan retribusi kepada para pedagang, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru membuat karcis retribusi yang diberikan kepada petugas pemungut atau kepala pasar untuk melakukan retribusi kepada para pedagang yang memakai jasa pasar seperti karcis sewa tempat berupa kios, los, dan pelataran. Namun, berdasarkan informasi kepala pasar bahwa efektifitas pengelolaan retribusi pasar di beberapa pasar di Kabupaten Barru belum berjalan dengan baik, ini dibuktikan banyaknya pedagang pasar yang masih menunggak uang retribusi sewa tempat yang dibayar perbulannya, sehingga pemasukan pada kas daerah tidak efektif karena tidak sesuai dengan peraturan retribusi pasar yang berlaku. Selain itu masalah lainnya adalah banyaknya kios dan lapak yang kosong yang tidak berfungsi dengan baik dikarenakan pedagang tidak mampu membeli ataupun menyewa dengan alasan harga yang ditentukan terlalu mahal. dalam hal ini mengakibatkan pembangunan pasar kurang maksimal dan efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul ***“Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru”***.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah retribusi pasar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barru?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah retribusi pasar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barru.

## D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Barru

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Barru khususnya kepada Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola retribusi pasar untuk lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan terbaik yang telah dikeluarkan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Barru.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian yang sama dapat dijadikan sumber referensi dan data tambahan mengenai kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru.

### 3. Bagi Lembaga Pendidikan.

Sebagai sebuah hasil karya yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang penelitian sejenisnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan teori

##### 1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Makna otonomi dalam suatu negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan secara tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan kepentingan nasional secara komprehensif. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proposional kepada pemerintah daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah.

Melihat dari asal bahasa otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum dan peraturan. Dengan demikian otonomi adalah pemerintah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Suparmoko (2002:61) mendefinisikan otonomi daerah sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperbaiki potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan peluang yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam mengurus melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintah diluar yang menjadi urusan

Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

- b. Kaitannya dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ekonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak terlalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud dengan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Suatu daerah dikatakan berhasil apabila otonomi daerah berjalan dengan baik yaitu adanya kemajuan perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang baik dan berkembang di daerahnya masing-masing. Berikut indikator keberhasilan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

- a. Setiap daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.
- d. Pendapatan asli daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhandan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan prekonomian daerah.

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Widjaja, HAW (2003: 42) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu upaya daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam memperoleh dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya ditunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah

lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) Menurut para ahli:

1). Halim dan Nasir (2006)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Mardiasmo (2002)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3). Ahmad Yani (2002)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam Melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Maka dari itu, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan

perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30).

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang menjadi wewenang daerah yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Sumber-sumber yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

#### 1. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepala daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung. (Siahaan, 5: 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Propinsi dan pajak daerah tingkat Kab/kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 34 tahun 2000.

#### 1. Pajak Daerah Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

### **b. Ciri-ciri retribusi daerah**

Dibawah ini merupakan ciri-ciri retribusi daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada tiap-tiap orang atau juga badan yang menggunakan jasa yang disiapkan oleh negara.

### **c. Tujuan retribusi daerah**

Tujuan dari Retribusi daerah pada dasarnya ini mempunyai atau memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara atau pun juga pemerintah daerah.

Dibawah ini merupakan tujuan pemungutan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan utama ialah untuk dapat mengisi kas negara atau juga kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnnya.
2. Tujuan tambahan ini ialah untuk mengatur kemakmuran masyarakat daerah melalui jasa yang diberikan dengan secara langsung kepada masyarakat.

### **d. Prinsip penetapan retribusi daerah**

Prinsip serta juga sasaran penetapan tarif retribusi ini dibedakan berdasarkan golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha serta juga Retribusi Perizinan Tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jenis pelayanan serta perizinan. Pelayanan daerah itu bisa atau dapat berupa pelayanan umum, yakni

Adapun beberapa fungsi retribusi daerah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber pendapatan daerah, retribusi daerah ini ialah salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu Retribusi Daerah ini ialah salah satu sumber pendapatan daerah.
- b. Pengatur kegiatan ekonomi daerah, retribusi daerah ini nantinya akan digunakan yakni sebagai pengatur kegiatan atau aktivitas ekonomi di daerah. Pemerintah daerah didalam mengatur kegiatan atau aktivitas ekonomi membutuhkan dana atau juga modal, nah retribusi daerah tersebutlah yang dijadikan salah satu dana atau juga modal tersebut.
- c. Stabilitas ekonomi daerah, Suatu daerah ini akan menghadapi segala macam masalah didalam bidang ekonomi, misalnya seperti inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Di dalam mengatasi sebuah masalah ini, retribusi daerah tersebut merupakan suatu modal penting untuk dapat membuat solusi seperti misalnya menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengontrol harga pasar serta lain sebagainya.

**f. Klarifikasi retribusi daerah**

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari sebagai berikut:
  - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c) Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat
  - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - f) Retribusi Pelayanan Pasar
  - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi Jasa Usaha terdiri dari sebagai berikut:
  - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  - c) Retribusi Tempat Pelelangan
  - d) Retribusi Terminal
  - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - g) Retribusi Rumah Potong Hewan
  - h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari sebagai berikut.

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek dan
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Adapun Subjek dan Objek Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Subjek Retribusi Daerah

menurut UU No. 28 tahun 2009 menyatakan bahwa subyek retribusi daerah terbagi atas:

- a) Subjek Retribusi Jasa Umum (pasal 125) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- b) Subjek Retribusi Jasa Usaha (pasal 139) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c) Subjek Retribusi Perizinan (pasal 147) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

## 2. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah Siahan (2009:619) terdiri atas:

- a) Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan Kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa umum pemerintah.
- b) Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c) Perizinan Tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi daerah (Undang-undang No. 28 Tahun 2009) terdiri atas:

- a) Pasal 109 objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Pasal 126 Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
  2. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c). pasal 140, objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **g. Asas Pemungutan Retribusi Daerah**

1. Asas keadilan, pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Berarti dalam peraturan dan pelaksanaan dan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa atau barang dan tidak membedakan antara obyek sat dengan obyek lainnya.
2. Asas yuridis, pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam artian:
  - a. Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah.
  - b. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan harus berpangkal pada keadilan.
3. Asas ekonomis, pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti:
  - a. Pemungutan retribusi harus tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
  - b. Pemungutan retribusi harus tidak menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

#### 4. Retribusi pasar

##### a. Pengertian retribusi pasar

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi parkir.

Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko atau kios, counter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah lainnya sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian, retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar.

Dalam peraturan daerah No. 3 tahun 2011 menjelaskan bahwa pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan yang lainnya.

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011 adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus yang disediakan oleh pedagang.

b. Klarifikasi retribusi pasar

Klarifikasi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

1. Menurut sifat prestasi negara

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.

2. Menurut cara menentukan jumlah pungutan

Retribusi pasar, Variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

3. Menurut cara pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios menggunakan system pembayaran harian mingguan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

1. Subyek dan obyek retribusi

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya "tak base" yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi disini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada disekitar pasar. obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

2. Tarif retribusi

Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan non strategi yang ditentukan oleh letak tempat yang berada dibangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan pedagang.

3. Sistem pemungutan retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan *smith's canons* yaitu:

- 1) Prinsip keadilan (*equity*), yaitu adanya kesamaan manfaat kesamaan riil yang diterima dan keadilan dalam kemampuan membayar retribusi.
- 2) Prinsip kepastian (*certainty*), yaitu persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum artinya pungutan hendaknya bersifat tegas, jelas dan pasti bagi pemakai jasa yang meliputi besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan pemerintah, dalam membuat laporan.
- 3) Prinsip kelayakan (*convenience*), yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang tepat dan menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya jangan terlalu menekan subyek penderita.
- 4) Prinsip ekonomi (*economy*), yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam penarikan retribusi.

## B. Tinjauan Empiris

**Tabel 2.1 Tinjauan Empiris**

| NO | NAMA PENELITI                   | JUDUL PENELITIAN   | HASIL PENELITIAN  |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Novita Eka Anggraini,<br>(2015) | Analisis Efektifitas<br>Retribusi Pelayanan<br>Pasar Tanjung dan | hasil penelitian ini<br>menunjukkan bahwa<br>Kontribusi retribusi |

|   |                         |  |   |   |
|---|-------------------------|--|---|---|
|   |                         |  | <p>Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.</p>            | <p>pelayanan Tanjung Retribusi Daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator Sangat Kurang. Sedangkan Laju pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung pada tahun anggaran 2009-2012 berada pada kategori Tidak Berhasil. Pertumbuhan hanya terjadi pada tahun 2012 sebesar 9,7%.</p> |
| 2 | Sutri Handayani, (2017) | <p>Potensi Retribusi pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.</p> | <p>Retribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli (PAD) Kabupaten Lamongan.</p> | <p>Efektifitas pemungutan retribusi pasar di kabupaten Lamongan dengan rata-rata sebesar 105,30% sudah berjalan secara efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten</p>  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | Lamongan rata-rata sebesar 1,85% dengan kriteria kurang berkontribusi.  |
| 3 | Eka Murni Asih, Akhmad Syarifuddin, (2020) | Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017 | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah 1,91% masih dalam kriteria kurang memiliki kontribusi. Pencapaian target Penerimaan Retribusi Pasar sudah Efektif yaitu 94,15%. Laju pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar pada tahun 2009-2017 Tidak Berhasil. Trend Penerimaan Retribusi Pasar untuk empat tahun yang akan datang menunjukkan peningkatan, tetapi tidak |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | signifikan.  |
| 4 | Dessy ayuni M<br>Todoho, David Paul<br>Elie Saerang dan<br>Inggriani, (2014) | Penerimaan Retribusi<br>Pasar Dalam Upaya<br>Meningkatkan<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Kota Tidore<br>Kepulauan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mencapai tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2009-2012 belum efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64%. Kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. |
| 5 | Abdul Rajab, 2020.   | Kontribusi Retribusi<br>Pasar Terhadap<br>Pendapatan Asli<br>Daerah Di Kabupaten<br>Mamuju.                      | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 1,52% sampai 1,1% dengan rata-rata kontribusi   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | terjadi pada tahun 2014 dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%  |
| 6 | Nur Anisa Megawati dan Ady Soejoto, (2012) | Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.          | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2007-2014 sangat fluktuatif serta memberikan kontribusi rata-rata setiap tahun sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,82%, pertumbuhan kontribusi rata-rata setiap tahun turun 14,4%. |
| 7 | Hasni, (2019)                              | Analisis kontribusi retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bau- | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pelayanan pasar dalam pendapatan asli daerah   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | Bau.  | pada tahun 2015 adalah sebesar 0,86%, pada tahun 2016 sebesar 0,12%, dan pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 0,91%.   |
| 8 | Lewi Malisan, Sudyono dan Hema Risa Miyen, (2018) | Analisis Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2013-2017. | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota samarinda pada tahun 2013-2017 terjadi perubahan atau berfluktuasi. Pada tahun 2013 persentase retribusi pasar sebesar 1,43% Dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,22%. Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 0,24% yakni 0,97%. Dan |

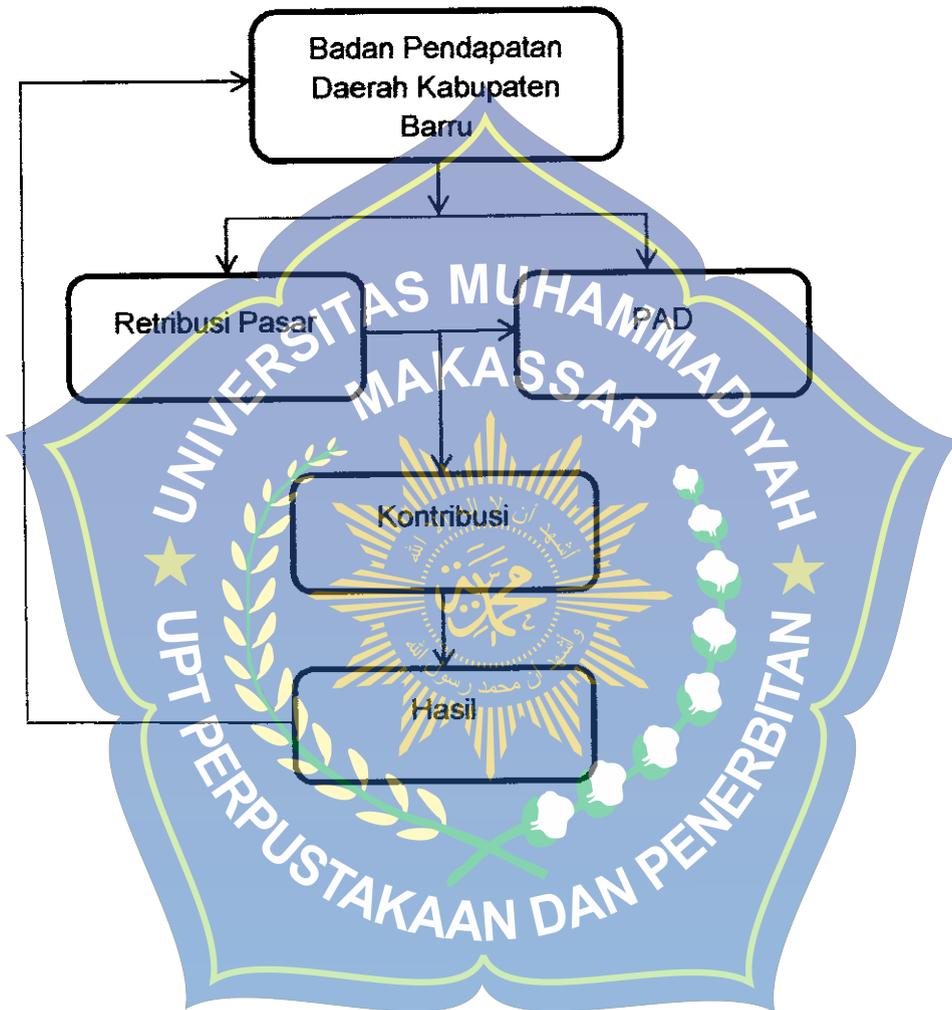
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>pada tahun 2016 meningkat 0,12% sebesar 1,09% dan Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 1,36%. Jadi yang merupakan pesentase kontribusi pasar tertinggi dari tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,43%.</p> |
|--|--|--|--|

### C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang lebih diketahui dalam suatu masalah tertentu kerangka pikir akan menghubungkan antara variabel-variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, digambarkan kerangka pikir untuk menjelaskan kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barru. Berikut gambar pemikiran skematis:

Tabel 2.2 Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini menggunakan data *time series* yang diperoleh melalui observasi dan melakukan pendataan terkait data-data yang dibutuhkan.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diangkat mengenai penerimaan daerah di sektor retribusi pasar, pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru dengan mengambil data waktu rencana mulai dari tahun 2015-2019. Sedangkan jangka waktu penelitian yang dilakukan mulai dari bulan oktober sampai dengan bulan november 2020.

#### C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2015, h.38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

### 1. Retribusi pasar

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota.

### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (*original local government revenue*) atau disingkat PAD, adalah penerimaan dari sumber-sumber didalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data pendukung yang diperoleh dengan cara memanfaatkan data atau arsip-arsip dari instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut di badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru. Data sekunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa laporan data, khususnya data mengenai retribusi pasar dan PAD beberapa tahun terakhir. Data yang dimaksud merupakan data yang bersifat nasional yang diambil dari BAPENDA Kabupaten Barru.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan oleh suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka menyelesaikan masalah tertentu.

beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sistem penerimaan retribusi pasar
2. Analisis Laju Pertumbuhan retribusi pasar
3. Analisis kontribusi

### Analisis Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Mengukur Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar digunakan rumus sebagai berikut (Abdul Halim : 163) :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Retribusi Pasar Thn}^n - \text{Retribusi Pasar Thn}^{n-1}}{\text{Retribusi Pasar}^{n-1}} \times 100$$

Laju pertumbuhan secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan kriteria laju pertumbuhan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar**

| PERSENTASE | KRITERIA        |
|------------|-----------------|
| 85%-100%   | Sangat Berhasil |
| 70%-85%    | Berhasil        |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 55%-70% | Cukup Berhasil  |
| 30%-55% | Kurang Berhasil |
| ≤30%    | Tidak Berhasil  |

Sumber: Kemendagri No. 690.900-327

### Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100$$

Sedangkan untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Maka digunakan indikator atau kriteria pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar**

| PERSENTASE | KRITERIA             |
|------------|----------------------|
| 0%-0,9%    | Tidak Berkontribusi  |
| 1%-1,9%    | Kurang Berkontribusi |
| 2%-2,9%    | Cukup Berkontribusi  |
| 3%-3,9%    | Berkontribusi        |
| >4%        | Sangat Berkontribusi |

Sumber: Kemendagri No. 690.900-327

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Pada masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda di mana wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *onder afdelling* Barru yang bernaung di bawah *afdeling* parepare. Sebagai kepala pemerintahan *onder afdelling* diangkat seorang *control* Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Self Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas *Self bestuur* di dalam *Afdelling* Parepare, yaitu:

1. Bekas *Self bestuur* Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili di bawah kekuasaan

Kerajaan Ajattapareng yang oleh Belanda diakui sebagai *Self bestuur*, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

2. Bekas *self Bestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili di bawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) sebagai satu *Self bestuur*, ialah bekas kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-kiru, Lili Ajakkang dan Lili Balusu.
3. Bekas *self Bestuur* Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
4. Bekas *self Bestuur* Tanete dengan pusat pemerintahannya di Pancana, daerahnya sekarang menjadi tiga kecamatan, masing-masing kecamatan Tanete Rilau, kecamatan Tanete Riaja dan kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Barru dengan ibu kota Barru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada ± 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja

Mallusetasi. Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu kota Kewedanaan Barru.

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Barru

Dengan adanya penetapan visi dan misi Kabupaten Barru diharapkan akan terwujud komitmen yang kuat dari pemerintahan serta masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Barru. Selain itu dengan adanya visi misi tersebut dapat menjadi tolak ukur terselenggaranya program kerja pembangunan agar dapat terealisasi dengan baik.

### Visi Kabupaten Barru

Secara umum, visi merupakan pandangan ideal di masa yang akan datang yang akan diwujudkan dan secara potensial terwujud. Maka visi pembangunan Kabupaten Barru adalah "Terwujudnya Kabupaten Barru lebih maju, sejahtera, taat azas, dan bermartabat yang bernafaskan keagamaan."

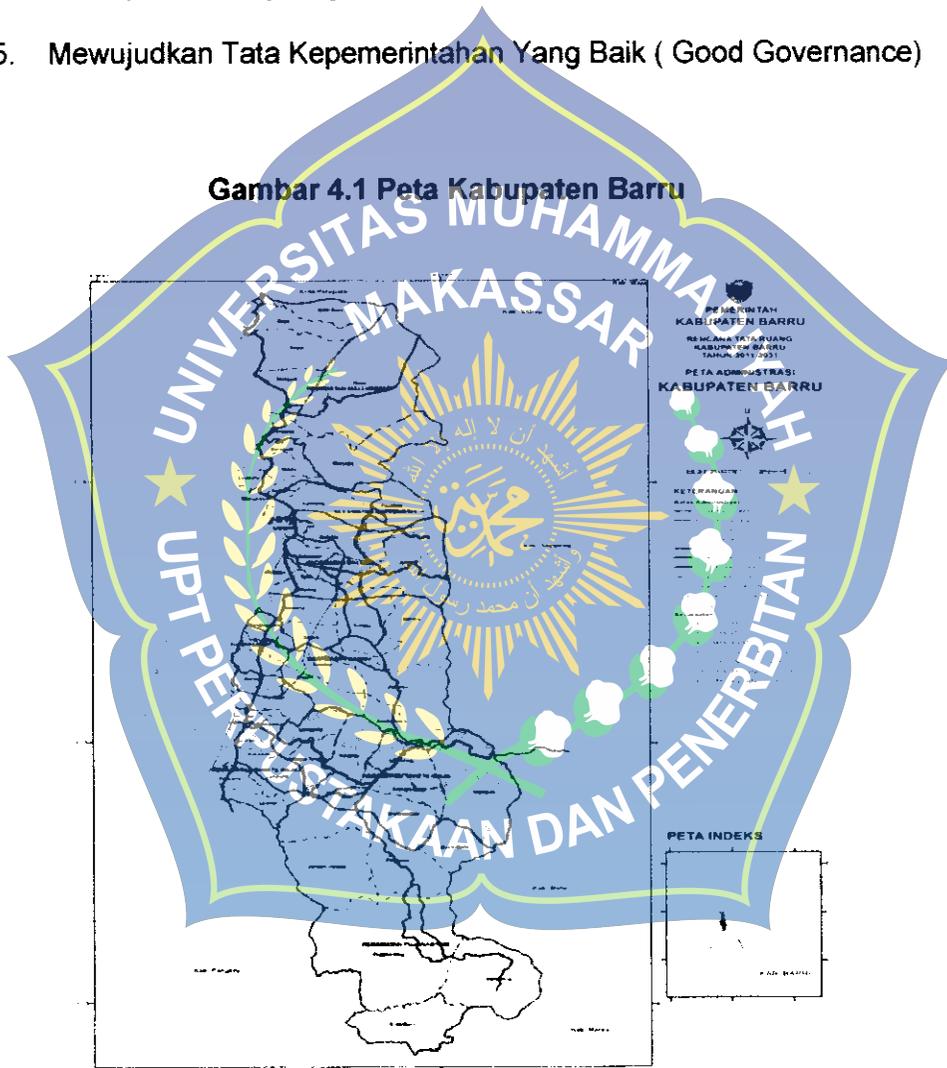
### Misi Kabupaten Barru

Misi mencerminkan segala sesuatu tentang program atau layanan yang ditawarkan dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk pencapaian misi. Oleh karenanya berdasarkan visi yang telah ditetapkan diatas maka misi Kabupaten Barru yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

2. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM
3. Mengembangkan Interkoneksi Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat Nasional, Regional Dan Internasional.
4. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif.
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance)

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Barru



### 3. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto Daerah HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis

pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusudan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- d. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif di Kabupaten Barru Tahun 2019**

| NO | Kecamatan     | Desa | Kelurahan | Luas   |       |
|----|---------------|------|-----------|--------|-------|
|    |               |      |           | Km     | %     |
| 1  | Tanete Riaja  | 6    | 1         | 174,29 | 14,84 |
| 2  | Tanete Rilau  | 8    | 2         | 79,17  | 6,74  |
| 3  | Barru         | 5    | 5         | 199,32 | 16,97 |
| 4  | Soppeng Riaja | 5    | 2         | 78,9   | 6,72  |
| 5  | Mallusetasi   | 5    | 3         | 216,58 | 18,44 |

|       |             |    |    |          |       |
|-------|-------------|----|----|----------|-------|
| 6     | Pujananting | 6  | 1  | 314,26   | 26,75 |
| 7     | Balusu      | 5  | 1  | 112,2    | 9,55  |
| Total |             | 40 | 15 | 1 174,72 | 100%  |

Sumber: Barru Dalam Angka, BPS 2019

#### 4. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°05'49" LS - 4°47'35" LS dan 119°35'00" BT - 119°49'16" BT. Luas Wilayah Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km<sup>2</sup> (117.472 Ha) dan berada ± 102 km didebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten Barru terletak diantara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi.

#### 5. Hidrologi dan Iklim

Di Kabupaten Barru terdapat 21 sungai yang tersebar di 7 kecamatan. Sungai Jampue di Kecamatan Mallusetasi merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Barru dengan panjang sungai 45,55 Km kemudian sungai Sumpang Binangae di Kecamatan Barru dengan panjang 44,95 Km. Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah ( 84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober – Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April – September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. Curah hujan di kabupaten Barru berdasarkan hari hujan

terbanyak pada bulan Desember – Januari dengan jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing- masing 104 mm dan 17 mm.

## 6. Kependudukan

Penduduk kabupaten Barru berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak, 174.323 jiwa yang terdiri atas 83.878 jiwa penduduk laki-laki dan 90.445 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,40% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,47% dan penduduk perempuan sebesar 0,35%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 93.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru Tahun 2019**

| Kecamatan    | Penduduk  |           |        | Rasio jenis kelamin |
|--------------|-----------|-----------|--------|---------------------|
|              | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |                     |
| 1            | 2         | 3         | 4      | 5                   |
| Tanete Riaja | 10.834    | 12.009    | 22.843 | 90                  |
| Pujananting  | 6.467     | 6.668     | 13.135 | 97                  |
| Tanete Rilau | 16.418    | 17.474    | 33.892 | 94                  |
| Barru        | 20.032    | 21.420    | 41.452 | 94                  |
| Soppeng      | 8.643     | 9.285     | 17.928 | 93                  |

|             |        |        |        |    |
|-------------|--------|--------|--------|----|
| Riaja       |        |        |        |    |
| Balusu      | 8.879  | 9.890  | 18.769 | 90 |
| Mallusetasi | 12.216 | 13.388 | 25.604 | 91 |

Sumber: Baru dalam angka, BPS 2019

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2019 mencapai 148/km<sup>2</sup> Dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 7 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan sebesar 429 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Pujananting sebesar 42 jiwa/km<sup>2</sup>.

## 7. Pendidikan

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menjamin kualitas pendidikan yang merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua penduduk. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu indikator dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah ataupun Negara dalam kemajuan bangsa ini.

**Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Barru.**

| Jenjang Pendidikan | APS   | APM   | APK    |
|--------------------|-------|-------|--------|
| SD/MI              | 99,68 | 97,89 | 108,11 |
| SMP/MTS            | 95,13 | 81,06 | 91,76  |
| SMA/MA             | 70,48 | 62,06 | 78,1   |

Sumber: Barru Dalam Angka, BPS 2019

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2019, Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APM mencapai 92,54 dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi berada pada jenjang SD/MI dengan APK 102,93.

## 8. Perekonomian

Dalam sistem perekonomian di Kabupaten Barru yang menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang bergerak dibidang pertanian dan perikanan. Dalam sektor pertanian seperti padi merupakan hasil pertanian yang memberikan kontribusi besar dalam laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Barru. Selain itu, jasa-jasa dan perdagangan, pajak hotel dan restoran juga menjadi faktor penggerak roda perekonomian dalam pengembanagan daerah di Kabupaten Barru.

Struktur perekonomian yang ada di Kabupaten Barru dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Beruto Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019**

| Lapangan Usaha (PDRB)   | PDRB Kabupaten Barru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
|   | 2016   | 2017         | 2018         | 2019         |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 1 436 850,73   | 1 501 205,32 | 1 581 307,62 | 1 652 719,43 |
| Pertambangan dan Penggalian                                   | 119 725,39   | 125 038,41   | 130 676,63   | 138 151,33   |
| Industri Pengolahan   | 212 667,09   | 222 579,87   | 232 090,92   | 253 699,70   |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 5 396,72   | 5 704,67     | 6 104,74     | 6 389,06     |
| Pengadaan Air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang       | 4 052,81   | 4 282,90     | 4 616,44     | 5 099,78     |
| Konstruksi  | 580 171,62   | 648 669,09   | 714 296,10   | 785 005,62   |
| perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor | 389 846,70   | 422 897,14   | 460 261,12   | 505 359,13   |
| Transportasi dan Pergudangan                                  | 91 687,47  | 98 826,24    | 111 504,53   | 126 159,10   |
| Penyediaan akomodasi dan makan Minum                          | 36 608,14  | 39 166,82    | 43 314,97    | 48 276,60    |
| Informasi dan Komunikasi                                      | 211 938,17   | 232 778,07   | 255 893,58   | 281 431,76   |
| Jasa keuangan dan Asuransi                                    | 115 171,01   | 117 762,21   | 120 716,12   | 124 636,22   |
| Real Estat  | 135 713,56   | 145 355,27   | 153 341,19   | 155 825,32   |
| Jasa Perusahaan   | 963,63   | 1 037,16     | 1 137,46     | 1 254,28     |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social      | 293 583,51   | 309 790,88   | 338 929,47   | 375 960,42   |
| Jasa pendidikan   | 158 635,95   | 165 048,76   | 173 780,59   | 186 480,84   |
| Jasa Kesehatan dan  | 98 153,87  | 102 552,19   | 108 275,50   | 117 298,45   |

|                                |              |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kegiatan lainnya               |              |              |              |              |
| Jasa lainnya                   | 25 169,76    | 27 288,81    | 30 294,19    | 33 682,63    |
| Produk domestic regional bruto | 3 916 336,13 | 4 169 983,81 | 4 466 541,17 | 4 797 429,68 |

Sumber: Barru Dalam Angka, BPS Tahun 2019

## B. Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru terletak di Jl. Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Bapenda Kabupaten Barru bertanggung jawab untuk urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Selain itu Badan pendapatan daerah atau juga dikenal dengan singkatan BAPENDA memiliki tugas dan fungsi lainnya. Bapenda memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Untuk fungsi BAPENDA adalah merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya.

Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab BAPENDA adalah pengawasan penerimaan pajak baik pajak rumah bangunan, tanah, kendaraan bermotor, PBB perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya. Terkait dengan hal itu, BAPENDA memiliki

wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya.

## 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

1. Kepala Badan
2. Sekertaris:
  - a. Kasubag program dan keuangan
  - b. Kasubag umum dan SDM
3. Bidang perencanaan dan pembangunan
  - a. Sub bidang perencanaan dan pendapatan
  - b. Sub bidang pengendalian dan evaluasi
  - c. Sub bidang hukum dan perundang-undangan
4. Bidang pendaftaran dan penetapan
  - a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan
  - b. Sub bidang perhitungan dan penetapan
  - c. Sub bidang pengelolaan dan informasi
5. Bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan
  - a. Sub bidang penagihan, keberatan dan penindakan
  - b. Sub bidang pembukuan dan pelaporan
  - c. Sub bidang sarana dan perasarana benda berharga

## 6. UPTB

## 3. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru priode tahun 2016-2019, yaitu Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu Daerah dibidang Pendapatan daerah.

Fungsi Badan pendapatan daerah Kabupaten Barru yaitu,

- a. yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.  
Perumusan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, pembukuan, dan pelaporan
- e. Pelaksanaan administrasi badan dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain



Gambar 2.2

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPENDA KAB. BARRU  
BERDASARKAN PERDA KAB. BARRU NO. 68 TAHUN 2019 TANGGAL 30  
DESEMBER 2016**



## C. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

### 1. Mekanisme Penerimaan Retribusi Pasar

#### a. Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru (BAPENDA) dalam pelaksanaan pemungutan retribusi menempatkan beberapa petugas pemungut retribusi. Beberapa petugas pemungut retribusi tersebut di kepala oleh seorang kepala pasar yang ditempatkan di setiap pasar, kepala pasar tersebut diangkat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru. Dalam sistem pemungutan retribusi pasar seorang kepala pasar bertugas untuk mengelola, mengatur dan mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi. Selain itu, kepala pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya. Pengawasan penarikan retribusi oleh kepala pasar sangat penting dilakukan supaya petugas retribusi tidak sewenang-wenang dalam memungut retribusi kepada pedagang.

Retribusi pasar yang dipungut dari setiap pedagang karena pedagang yang melakukan usaha berdagang di pasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di pasar. mengenai fasilitas-fasilitas yang dimiliki pasar adalah terdiri dari kantor pasar, loket pasar, tanah, los, kios, MCK, mushola, air, listrik, bak sampah, parkir, lokasi

bongkar muat barang dagangan dan saluran air. Penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selain beberapa hal tersebut di atas, maka penetapan tarif retribusi juga didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

**b. Pengurusan, Pengelolaan dan Pembinaan Pasar**

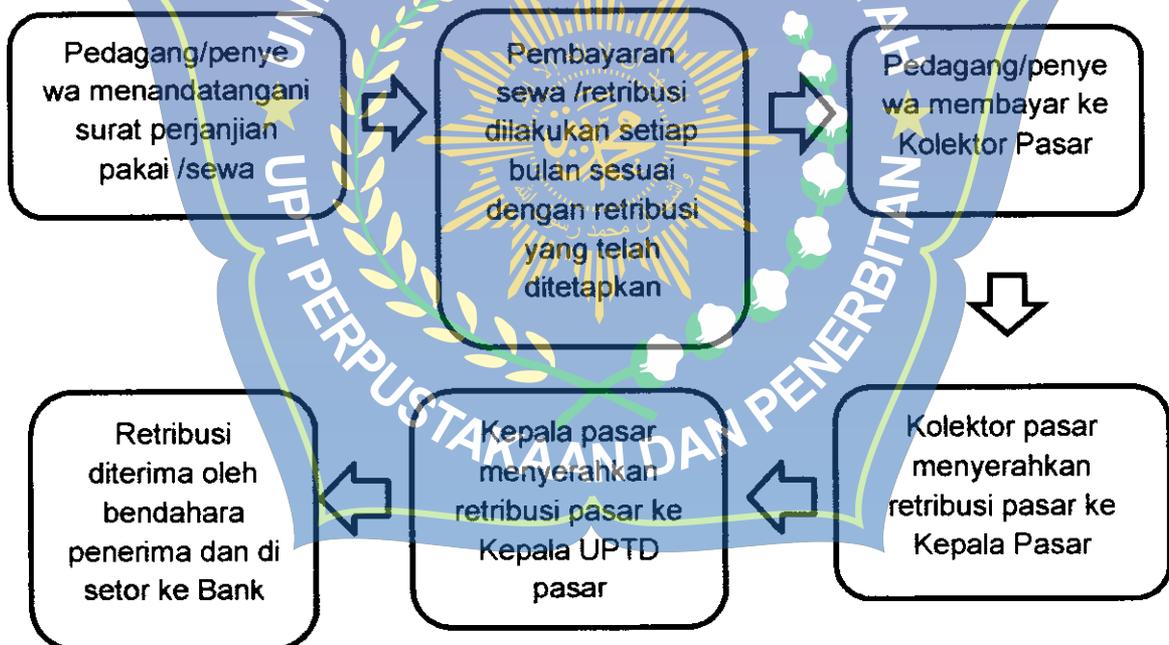
Setiap pasar diurus, dikelola dan dibina oleh Pemerintah Daerah melalui kepala pasar yang ditugaskan di setiap pasar. Pasar pemda dikelola oleh pemerintah daerah sedangkan pasar desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pasar pemerintah ditunjuk oleh Kepala Bapenda dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Kepala Pasar.

Kepala Pasar disamping mengurus dan mengelola pasar pemerintah juga mengelola pasar desa di wilayahnya dalam hal tertib administrasinya, Kepala pasar bertanggung jawab kepada Kepala BAPENDA. Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Pasar, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban.

Pembinaan yang dilakukan adalah tentang tata ruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi. Pembinaan ini dilakukan karena pedagang sering seenaknya dalam menggelar dagangannya dan menimbulkan kesan semraut.

**c. Standar Operasional Prosedur Aliran Retribusi**

**Gambar 2.3 SOP Aliran Retribusi**



**1. Pemungutan Retribusi/kolektor pasar**

Mempunyai tugas memungut retribusi kepada pedagang dipasar, baik yang ada didalam area pasar ataupun yang berada dirayon pasar, selanjutnya melaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada

Kepala pasar yang bertindak sebagai koordinator pencatatan uang retribusi disertai dengan surat tanda bukti setoran.

## 2. Kepala Pasar

Kepala pasar bertugas mengumpulkan, menghitung dan mencatat semua uang retribusi yang masuk dari seluruh pasar yang disetorkan oleh masing-masing kepala pasar. Setelah perhitungan dan pencatatan selesai maka uang retribusi disetorkan seluruh uang retribusi ke Kepala UPTD Pasar.

## 3. Kepala UPTD Pasar

Kepala UPTD Pasar bertugas untuk Menerima semua hasil pungutan retribusi yang dikumpulkan oleh Kepala pasar. Setelah itu menyerahkan ke bendahara penerima yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah lalu kemudian menyetor ke BPD.

## 4. BPD (Bank Pembangunan Daerah)

Bank pembangunan daerah (BPD) Adalah tempat dimana uang hasil setoran retribusi pasar tersebut diterima sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**d. Data Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar dalam Penerimaan PAD Kabupaten Barru Tahun 2015-2019**

Dari hasil rekap realisasi penerimaan PAD yang dikelola dan disetor ke kas daerah retribusi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Barru sebagai berikut:

Pasar Ralla baru menyetor pada tahun 2016 dengan penyetoran sebesar 62.075.000, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 68.371.000 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 37.747.500 kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 76.894.000.

Pasar Lisu pada tahun 2015 dengan penyetoran sebesar 28.535.000, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 38.520.000, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 35.104.000. pada tahun 2018 kembali menurun sebesar 30.983.000 dan pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 44.439.000.

Pasar Pekkae pada tahun 2015 dengan penyetoran sebesar 409.885.000, kemudian pada tahun 2016 meningkat sebesar 522.736.000, dan kembali mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 532.278.525. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 470.889.025, dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 293.416.075.

Pasar Mattirowalie pada tahun 2015 dengan penyeteran sebesar 632.665.000, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 820.079.000 begitu juga pada tahun 2017 sebesar 904.935.925. kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 854.518.875. dan pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 519.736.175.

Pasar Takkalasi pada tahun 2015 menyeter sebesar 25.160.000, kemudian pada tahun 2016 meningkat sebesar 29.885.000. dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 158.485.000. Namun ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 82.105.000 dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 309.355.000.

Pasar Mangkoso pada tahun 2015 menyeter sebesar 64.293.650, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 114.856.500, pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 115.408.350, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 102.216350. dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 172.373.650.

Pasar Palanro pada tahun 2015 menyeter sebesar 82.428.250. kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 106.692.750

dan tahun 2017 sebesar 181.786.000. namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 129.083.050. dan pada taun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 216.196.050.

Pasar doi-doi baru menyeter ditahun 2019 sebesar 62.990.000. karena merupakan pasar baru yang dibangun oleh pemerintah daerah dan baru beroperasi pada tahun 2019.



**Tabel 4.5 Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2015-2019 di Kab. Barru**

| NO | Nama Pasar        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | Jumlah        |
|----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | Pasar Ralla       | -           | 62.075.000  | 68.371.000  | 37.747.500  | 76.894.000  | 245.087.5000  |
| 2  | Pasar Lisu        | 28.535.000  | 38.520.000  | 35.104.000  | 30.983.000  | 44.439.000  | 177.581.000   |
| 3  | Pasar Pekkae      | 409.885.000 | 522.736.000 | 532.278.525 | 470.889.025 | 293.416.075 | 2.229.204.625 |
| 4  | Pasar Mattiowalie | 632.665.000 | 820.079.800 | 904.935.925 | 854.518.875 | 519.736.175 | 3.731.935.775 |
| 5  | Pasar Takkalasi   | 25.160.000  | 29.885.000  | 158.485.000 | 82.105.000  | 309.355.000 | 604.990.000   |
| 6  | Pasar Mangkoso    | 64.293.650  | 114.856.500 | 115.408.350 | 102.216.350 | 172.373.650 | 569.148.500   |
| 7  | Pasar Palanro     | 82.428.250  | 106.692.750 | 181.786.000 | 129.083.050 | 216.196.050 | 716.186.100   |
| 8  | Pasar Doi-Doi     | -           | -           | -           | -           | 62.990.000  | 62.990.000    |

Sumber: Bapenda Kab. Barru (Diolah)

## 2. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar

Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi pasar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikelola.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data penerimaan retribusi pasar dari Bapenda yang ada dalam tabel 4.5 dibawah ini tentang target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Barru tahun 2015-2019 sebagai berikut.

**Tabel 4.5 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Barru Tahun 2015-2019**

| Tahun | Target (RP)      | Realisasi (RP)   |
|-------|------------------|------------------|
| 2015  | 1.400.000.000.00 | 1.242.966.900.00 |
| 2016  | 1.400.000.000.00 | 1.694.845.050.00 |
| 2017  | 1.876.053.050.00 | 1.996.368.800.00 |
| 2018  | 2.387.121.000.00 | 1.707.542.800.00 |
| 2019  | 2.467.385.000.00 | 1.695.399.950.00 |

Sumber : Bapenda Kabupaten Barru

Laju Pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan retribusi pasar dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Pasar Thn}^n - \text{Retribusi Pasar Thn}^{n-1}$$

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Retribusi Pasar} - \text{Retribusi Pasar}^{n-1}}{\text{Retribusi Pasar}^{n-1}} \times 100$$

**1. Hasil Analisis Pertumbuhan Retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barru Tahun 2015-2019**

a. Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar tahun 2016

$$= \frac{1.694.845.050,00 - 1.242.966.900,00}{1.242.966.900,00} \times 100\%$$

$$= 36,35\%$$

b. Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar tahun 2017

$$= \frac{1.996.368.800,00 - 1.694.845.050,00}{1.694.845.050,00} \times 100\%$$

$$= 17,79\%$$

c. Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar tahun 2018

$$= \frac{1.707.542.800,00 - 1.996.368.800,00}{1.996.368.800,00} \times 100\%$$

$$= -14,47\%$$

d. Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar tahun 2019

$$= \frac{1.695.399.950,00 - 1.707.542.800,00}{1.707.542.800,00} \times 100\%$$

$$= -0,71\%$$

**Tabel 4.6 Kriteria Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Barru Tahun 2015-2019**

| Tahun Anggaran   | Retribusi Pasar (Rp) | Pertumbuhan (%) | Kriteria              |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 2015             | 1.242.966.900.00     | -               | -                     |
| 2016             | 1.694.845.050.00     | 36,35%          | Kurang Berhasil       |
| 2017             | 1.996.368.800.00     | 17,79%          | Tidak Berhasil        |
| 2018             | 1.707.542.800.00     | (14,47%)        | Tidak Berhasil        |
| 2019             | 1.695.399.950.00     | (0,71%)         | Tidak Berhasil        |
| <b>Rata-rata</b> |                      | <b>9,74%</b>    | <b>Tidak Berhasil</b> |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Diolah)

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar pada tahun 2016 yaitu 36,35% dengan kriteria kurang berhasil, tahun 2017 menurun menjadi 17,79% dengan kriteria tidak berhasil, Tahun 2018 menurun drastis menjadi (14,47%) dengan kriteria tidak berhasil, dan pada tahun 2019 masih menurun yaitu (0,71%) dengan kriteria tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 9,74% dinilai tidak berhasil.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah badan pendapatan daerah Kabupaten Barru dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan retribusi pasar adalah tidak berhasil.

### 3. Analisis Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan

ekonomi dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, tabel berikut ini menggambarkan Kontribusi Retribusi Pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Pasar}}{\text{PAD}} \times 100$$

## 2. Hasil Analisis Kontribusi Retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barru Tahun 2015-2019

### 1. Kontribusi Penerimaan Retribusi pasar pada tahun 2015

$$= \frac{1.242.966.900.00}{74.239.999.181.94} \times 100$$

$$= 1,67\%$$

### 2. Kontribusi Penerimaan Retribusi pasar pada tahun 2016

$$= \frac{1.694.845.050.00}{59.966.015.086.73} \times 100\%$$

$$= 2,83\%$$

### 3. Kontribusi Penerimaan Retribusi pasar pada tahun 2017

$$= \frac{1.996.368.800.00}{130.717.794.632.70} \times 100\%$$

$$= 1,53\%$$

## 4. Kontribusi Penerimaan Retribusi pasar pada tahun 2018

$$= \frac{1.707.542.800.00}{104.627.706.924.57} \times 100$$

$$= 1,63\%$$

## 5. Kontribusi Penerimaan Retribusi pasar pada tahun 2019

$$= \frac{1.695.399.950.00}{103.887.386.166.26} \times 100\%$$

$$= 1,63\%$$

**Tabel 4.7 Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Barru Tahun 2015-2019**

| Tahun            | Realisasi<br>Retribusi Pasar<br>(RP) | Realisasi PAD (RP) | Persentase   | Kriteria             |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 2015             | 1.242.966.900.00                     | 74.239.999.181.94  | 1,67%        | Kurang               |
| 2016             | 1.694.845.050.00                     | 59.966.015.086.73  | 2,83%        | Cukup                |
| 2017             | 1.996.368.800.00                     | 130.717.794.632.70 | 1,53%        | Kurang               |
| 2018             | 1.707.542.800.00                     | 104.627.706.924.57 | 1,63%        | Kurang               |
| 2019             | 1.695.399.950.00                     | 103.887.386.166.26 | 1,63%        | Kurang               |
| <b>Jumlah</b>    |                                      |                    | <b>9,25%</b> | <b>Kurang</b>        |
| <b>Rata-rata</b> |                                      |                    | <b>1,85%</b> | <b>Berkontribusi</b> |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Diolah)

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar 1,67%, pada tahun 2016 sebesar 2,83%, tahun 2017 sebesar 1,53%, tahun 2018 dan 2019 sebesar 1,63%, sesuai dengan kriteria sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi retribusi pasar terhadap

pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 1,85% dinilai kurang berkontribusi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten baru harus lebih mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan yang terkait dalam penerimaan retribusi pasar, sehingga dalam hal ini kontribusi retribusi pasar sebagai retribusi daerah kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Baru.

Dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Baru kurang memiliki kontribusi sedangkan tingkat pertumbuhan retribusi pasar dinilai tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyebab kurang berkontribusinya pasar terhadap pendapatan asli daerah adalah pemerintah khususnya kolektor pasar belum maksimal dalam pengelolaan retribusi pasar. Ini dibuktikan bahwa adanya tunggakan pembayaran retribusi pasar yang dilakukan pedagang sehingga pemasukan pada kas daerah tidak efektif. Selain itu penyebab lainnya adalah banyaknya kios dan lapak yang kosong yang tidak berfungsi dengan baik dikarenakan pedagang tidak mampu membeli ataupun menyewa dengan alasan harga yang ditentukan terlalu mahal. dalam hal ini mengakibatkan pembangunan pasar kurang maksimal dan efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Eka Murni Asih (2020) yang berjudul "Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017" menyatakan bahwa kontribusi penerimaan retribusi pasar masih dalam kriteria kurang memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata kontribusi

1,98% sedangkan laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar dari tahun 2009-2017 mengalami kriteria tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena revitalisasi/pembangunan pasar yang sedang berlangsung sehingga pasar kurang efektif dan retribusi pasar mengalami penurunan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Novita Eka Angraini (2015) yang berjudul "Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto" menyatakan bahwa Kontribusi retribusi pelayanan Pasar Tanjung terhadap Retribusi Daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator Sangat Kurang. Keadaan kontribusi Retribusi Pasar Tanjung untuk Retribusi Daerah 4 tahun terakhir selalu menurun. Sedangkan Laju pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung pada tahun anggaran 2009-2012 berada pada kategori Tidak Berhasil. Pertumbuhan hanya terjadi pada tahun 2012 sebesar 9,7%. Hal tersebut terjadi dikarenakan Petugas Juru Pungut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tanjung kurang optimal melaksanakan pemungutan retribusi atau dalam pemungutan retribusi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib retribusi daerah dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal, misal adanya penambahan jumlah pedagang liar yang belum terdeteksi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Dinilai berkontribusi namun hanya sebesar 1,85%. Di mana, berdasarkan kriteria dan indikator penilaian yang dipakai menjelaskan bahwa kontribusi tersebut dinilai masih kurang, karena kontribusi rata-ratanya berada dibawah 2%. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Barru selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2015-2019 adalah befluktuasi dengan rata-rata sebesar 9,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan pendapatan asli daerah disektor retribusi pasar adalah tidak berhasil.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, serta penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru agar lebih memperkuat serta memaksimalkan pemungutan retribusi, meningkatkan pengawasan penarikan retribusi pasar, menekankan

kembali target yang harus dicapai setiap tahunnya mengingat retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

2. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru agar lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar untuk itu petugas kolektor pasar harus lebih tegas seperti pemberian sanksi kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh, hal ini akan mendorong kedisiplinan para pedagang dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar retribusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulul. 2014. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Vol VI No. 1, (Online) (<https://journal.upstegal.ac.id>, diakses pada tgl 23 juni 2020).
- Anggraini, Novita Eka. 2015. Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto. *Jurnal perpajakan JEJAK* (Online) Vol. 1 No. 1, (<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>, diakses pada tgl 23 juni 2020).
- Anonim. 2001. *Rumus Kontribusi Fakultas Ekonomi*. Yogyakarta.
- Asih, Eka Murni. 2020. Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen tahun 2008-2017. Vol 1 No. 1, (Online) *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. (diakses pada tgl 23 juni 2020).
- Aswicahyono Haryo, David Christian. 2017. Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016. *CSIS Working paper Series 02-2017*. (Online), (<https://csis.or.id>, diakses tgl 04 juli 2020).
- Badan Pendapatan Daerah. Laporan Keuangan. *Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah kabupaten baru tahun 2015-2019*. BAPENDA Kabupaten Barru. Sulawesi Selatan.
- Endah, Kiki. 2016. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, (Online), Vol 2 No. 2, (<https://jurnal.unigal.ac.id>, diakses tgl 03 juli 2020)
- Handayani, Sutri. 2017. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. (Online). Vol 11 No. 1, (<https://Jrnalekonomi.unisla.ac.id>, diakses pada tgl 21 juli 2020)
- Hasni. 2019. Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bau-Bau. *Jurnal ilmiah akuntansi manajemen*, (Online), Vol 2 No. 2, (<https://www.jurnal-umbuton.ac.id>, diakses pada tgl 11 juli 2020).
- Mafazah Wilda, Yuniadi Mayowan, Tri Henri Sasetiadi. 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, (Online), Vol 11 No. 1, (<https://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>, diakses tgl 21 Juni 2020).
- Malisan Lewi, Sudyono, Hema Risa Miyen. 2018. Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2013-

2017. *Jurnal Ekonomika*, (Online), Vol 7 No. 2, (<https://journal.uwgm.ac.id>, diakses pada tgl 11 juli 2020).

Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., Akt., QIA., CFA., CA. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI).

Megawati Nur Anisa, Ady Soejoto. 2012. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, (Online), Vol 1 No. 1, (<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>, diakses pada tgl 11 juli 2020).

Mubarak, Dharma Hammam Nur. 2016. Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (Online), Vol 18, No. 2, (<http://journal.feb.unmul.ac.id>, diakses pada tgl 23 juni 2020).

Prof. Dr. Sugiyono, 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.

Rajab, Abdul. 2020. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju. *Jurnal ilmiah Ekonomi Pembangunan*, (Online), Vol 1, No. 2, (<https://stiemanduju.e-journal.id/GJIEP>, diakses pada tgl 3 juli 2020).

Sari, Indri Fitria. 2017. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Solok). *Majalah Ilmiah*, (Online), Vol 24 No. 2, (<https://sc.hoiar.unand.ac.id>, diakses tgl 23 juni 2020).

Sri, 2003. *Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah pendekatan refleksi*. Yogyakarta: BPFE.

Toduh Dessy Ayuni M, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim. 2014. Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA*, (Online), Vol 2 No. 2, (<https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses pada tgl 23 juni 2020).

Tim Penyusun Pedoman penulisan skripsi. 2017. *Pedoman penulisan skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

*Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Widjaja, Prof. Drs. Haw. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

L



A

M

P

I

R

A

N

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp10.425.113.973,88 atau 132,55% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.865.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Daftar Pendapatan Pajak Daerah

| No. | Uraian                                    | 2015                            |                   | %      | 2014             |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|--------|------------------|
|     |   | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)    |        | Realisasi (Rp)   |
| 1   | Pajak Hotel                               | 26.000.000,00                   | 33.598.500,00     | 134,26 | 29.807.700,00    |
| 2   | Pajak Restoran                            | 150.000.000,00                  | 173.280.821,00    | 115,48 | 84.818.280,00    |
| 3   | Pajak Hiburan                             | 5.000.000,00                    | 1.280.000,00      | 25,20  | 0,00             |
| 4   | Pajak Reklame                             | 36.000.000,00                   | 45.120.900,00     | 128,91 | 40.944.280,00    |
| 5   | Pajak Penarikan jalan                     | 2.700.000.000,00                | 4.607.815.288,00  | 148,42 | 3.484.444.080,00 |
| 7   | Pajak Air Tanah                           | 0,00                            | 0,00              |        | 3.708.882.647,88 |
| 8   | Pajak Pengambilan Balok Galian Gol C      | 1.500.000.000,00                | 7.343.035.412,88  | 156,20 | 611.701.088,00   |
| 9   | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 750.000.000,00                  | 506.011.993,00    | 67,46  | 780.885.880,00   |
| 10  | Pajak Bumi dan Bangunan                   | 2.700.000.000,00                | 3.315.343.058,00  | 123,00 |                  |
|     | Jumlah                                    | 7.865.000.000,00                | 10.425.113.973,88 | 132,55 | 8.768.981.832,88 |

Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2015

TA 2014

Rp4.920.778.776,00

Rp15.922.303.552,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp4.920.778.776,00, atau 21,88% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.489.061.480,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah

| No. | Uraian   | 2015                            |                  | %      | 2014              |
|-----|--|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|
|     |  | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   |        | Realisasi (Rp)    |
| 1   | Retribusi Pelayanan Kesehatan                          | 18.603.421.480,00               | 1.328.771.042    | 7,14   | 12.220.502.927,00 |
| 2   | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan             | 35.000.000,00                   | 67.400.000,00    | 192,57 | 41.000.000,00     |
| 3   | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum          | 15.000.000,00                   | 11.000.000,00    | 73,33  | 15.100.000,00     |
| 4   | Retribusi Pelayanan Pasar                              | 1.400.000.000,00                | 1.242.956.900,00 | 88,78  | 1.489.840.650,00  |
| 5   | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                 | 90.000.000,00                   | 82.090.000,00    | 91,21  | 85.895.000,00     |
| 6   | Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil | 0,00                            | 0,00             | 100,00 | 3.190.000,00      |
| 7   | Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang                  | 15.000.000,00                   | 0,00             | 0,00   | 21.409.743,00     |
| 8   | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                    | 201.000.000,00                  | 341.257.600,00   | 169,78 | 197.982.400,00    |
| 9   | Retribusi Tempat Pelelangan                            | 50.000.000,00                   | 48.790.000,00    | 97,58  | 46.117.000,00     |
| 10  | Retribusi Terminal                                     | 335.000.000,00                  | 331.641.350,00   | 98,99  | 363.521.800,00    |

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016

| No | Uraian                                    | 2016                            |                   | %      | 2015              |
|----|---|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|
|    |   | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)    |        | Realisasi (Rp)    |
| 1  | Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C      | 1.500.000.000,00                | 1.831.874.570,20  | 128,70 | 2.343.035.417,88  |
| 2  | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 150.000.000,00                  | 938.249.676,00    | 125,10 | 508.011.993,00    |
| 3  | Pajak Bumi dan Bangunan                   | 1.200.000.000,00                | 3.878.556.209,80  | 119,87 | 3.115.343.059,00  |
|    | Jumlah                                    | 8.870.000.000,00                | 11.487.970.906,80 | 129,51 | 10.426.113.973,88 |

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2016 TA 2015  
Rp7.036.836.052,00 Rp4.920.778.776,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp7.036.836.052,00, atau 58,92% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.943.926.500,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah

| No. | Uraian  | 2016                            |                  | %      | 2015             |
|-----|---|---------------------------------|------------------|--------|------------------|
|     |   | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   |        | Realisasi (Rp)   |
| 1   | Retribusi Pelayanan Kesehatan   | 7.725.811.500,00                | 2.508.178.250,00 | 32,46  | 1.328.771.042,00 |
| 2   | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                            | 50.000.000,00                   | 65.500.000,00    | 131,00 | 67.400.000,00    |
| 3   | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                         | 15.000.000,00                   | 14.800.000,00    | 97,33  | 11.000.000,00    |
| 4   | Retribusi Pelayanan Pesat   | 1.400.000.000,00                | 1.694.845.050,00 | 121,08 | 1.242.888.900,00 |
| 5   | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                                | 89.100.000,00                   | 81.405.000,00    | 91,38  | 82.080.000,00    |
| 6   | Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil                | 0,00                            | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 7   | Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang                                 | 15.000.000,00                   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 8   | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                   | 244.000.000,00                  | 294.099.400,00   | 120,53 | 341.257.800,00   |
| 9   | Retribusi Tempat Pelelangan   | 50.000.000,00                   | 50.751.000,00    | 101,50 | 48.780.000,00    |
| 10  | Retribusi Terminal  | 342.125.000,00                  | 298.138.500,00   | 87,14  | 331.841.350,00   |
| 11  | Retribusi Tempat Khusus Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum | 300.000.000,00                  | 447.898.000,00   | 149,30 | 355.450.000,00   |
| 12  | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan                                     | 74.890.000,00                   | 83.416.210,00    | 111,38 | 81.913.700,00    |
| 13  | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga                                | 35.000.000,00                   | 23.841.000,00    | 68,12  | 18.400.000,00    |
| 4   | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                             | 540.000.000,00                  | 173.875.000,00   | 32,20  | 91.081.250,00    |
| 5   | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                                    | 500.000.000,00                  | 819.514.492,00   | 163,92 | 399.213.000,00   |
| 5   | Retribusi Izin Ganguan/Keramaian                                      | 350.000.000,00                  | 466.388.150,00   | 133,25 | 202.247.950,00   |
|     | Retribusi Izin Trayek   | 10.000.000,00                   | 13.915.000,00    | 139,15 | 12.595.000,00    |

|                  |                           |                           |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Program          |                           |                           |
| Jumlah           | Rp4.262.478.661,00        | Rp7.094.584.570,00        |
| <b>Realisasi</b> | <b>2017</b>               | <b>2016</b>               |
| <b>Dana</b>      | <b>Rp4.262.478.661,00</b> | <b>Rp7.094.584.570,00</b> |

Realisasi Pendapatan Eksternal Daerah pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp4.262.478.661,00, atau 93,02% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.584.584.570,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Pendapatan Eksternal Daerah

| No | Uraian   | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   | %      | Realisasi (Rp)   |
|----|--|---------------------------------|------------------|--------|------------------|
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan  | 1.783.000.000,00                | 1.733.171.118,00 | 97,04  | 2.508.178.250,00 |
| 2  | Retribusi Pelayanan Pemrosesan Sampah / Kebersihan                         | 80.000.000,00                   | 62.781.000,00    | 78,37  | 68.200.000,00    |
| 3  | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                              | 18.800.000,00                   | 1.400.000,00     | 7,23   | 13.000.000,00    |
| 4  | Retribusi Pelayanan Pasar  | 1.870.063.000,00                | 1.006.368.800,00 | 53,60  | 1.004.348.000,00 |
| 5  | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                                     | 65.620.000,00                   | 51.170.000,00    | 77,99  | 81.408.000,00    |
| 7  | Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang                                      | 4.000.000,00                    | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 8  | Retribusi Penarikan Kalkulasi Daerah                                       | 654.000.000,00                  | 197.597.400,00   | 30,21  | 294.096.400,00   |
| 9  | Retribusi Temporal Pelanggaran Lalu Lintas                                 | 80.000.000,00                   | 68.861.000,00    | 86,07  | 80.751.000,00    |
| 10 | Retribusi Terminal   | 242.125.000,00                  | 216.668.750,00   | 89,48  | 238.136.000,00   |
| 11 | Retribusi Temporal Khusus Parkir Untuk Kendaraan Persempang dan Bis Lintas | 500.000.000,00                  | 566.882.000,00   | 113,38 | 447.368.000,00   |
| 12 | Retribusi Pelayanan Kelembutan   | 90.000.000,00                   | 104.717.296,00   | 116,35 | 83.416.200,00    |

| No | Uraian   | 2017                            |                | %      | 2016           |
|----|--|---------------------------------|----------------|--------|----------------|
|    |  | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) |        | Realisasi (Rp) |
| 13 | Retribusi Temporal Perwisata dan Khusus Parkir | 39.000.000,00                   | 25.570.000,00  | 65,56  | 23.941.000,00  |
| 14 | Retribusi Penyulian Produksi Usaha Daerah      | 300.000.000,00                  | 481.549.000,00 | 120,39 | 173.875.000,00 |
| 15 | Retribusi Izin                                 | 800.000.000,00                  | 627.009.200,00 | 78,37  | 815.114.200,00 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018

Masing-masing realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2018 dan 2017 dapat diuraikan sebagai berikut

**1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5 Daftar Pendapatan Retribusi Jasa Umum**

| No | Uraian                                       | 2018                    |                         | %            | 2017                    |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|    |  | Anggaran<br>Berkas (Rp) | Realisasi (Rp)          |              | Realisasi (Rp)          |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                | 4.847.011.300,00        | 2.047.110.000,00        | 64,29        | 1.738.171.118,00        |
| 2  | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan   | 22.000.000,00           | 74.100.000,00           | 119,52       | 69.701.000,00           |
| 3  | Retribusi Pelayanan Parur di Tepi Jalan Umum | 0,00                    | 580.000,00              | 0,00         | 1.400.000,00            |
| 4  | Retribusi Pelayanan Pasar                    | 2.387.121.000,00        | 1.707.542.000,00        | 71,53        | 1.066.388.000,00        |
| 5  | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor       | 62.840.000,00           | 46.525.000,00           | 74,04        | 51.170.000,00           |
| 6  | Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang        | 13.702.000,00           | 13.890.000,00           | 102,10       | 0,00                    |
| 7  | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 200.000.000,00          | 235.925.200,00          | 117,96       | 0,00                    |
|    | <b>Jumlah</b>                                | <b>7.372.674.500,00</b> | <b>5.066.782.000,00</b> | <b>68,71</b> | <b>3.854.810.916,00</b> |

Tabel diatas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum tahun 2018 sebesar Rp7.372.674.500,00 terealisasi sebesar Rp5.066.782.000,00 atau 68,71%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp3.854.810.916,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.210.971.084,00 yang disebabkan oleh adanya penerimaan Retribusi Pelayanan Tera dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimana tahun 2017 tidak ada penerimaan dari kedua retribusi tersebut. Sedangkan yang tidak mencapai target anggaran tahun 2018 adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Penyebab tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan adanya klaim BPJS tahun 2018 yang belum disetorkan.

Penyebab tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Pasa disebabkan oleh kurangnya penerimaan retribusi dari pasar Takkala karena adanya rehabilitasi pasar yang dilakukan di Bulan Juli dan sekarang masih dilakukan penataan ulang untuk penempatan pasa. Sedangkan penyebab tidak tercapainya target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikarenakan berkurangnya jumlah armada angkutan yang melakukan pengujian kendaraan.

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019**

SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Barru tahun 2019 didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**Tabel 17 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah**

| No     | Uraian             | 2019                            |                  | %      | 2018             |
|--------|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|
|        |                    | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   |        | Realisasi (Rp)   |
| 1      | Jasa Umum          | 7.340.000.000,00                | 5.179.880.000,00 | 70,18  | 5.085.782.000,00 |
| 2      | Jasa Usaha         | 3.537.000.000,00                | 2.192.317.221,00 | 62,13  | 1.201.730.000,00 |
| 3      | Perizinan Tertentu | 1.149.600.000,00                | 1.466.880.750,00 | 127,64 | 1.056.641.575,00 |
| Jumlah |                    | 12.026.290.700,00               | 8.839.078.327,00 | 73,92  | 7.124.368.885,00 |

Tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp8.811.848.327,00 atau 73,02% dari anggaran sebesar Rp12.067.290.750,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp7.124.358.585,00, mengalami peningkatan sebesar Rp1.687.489.742,00. Masing-masing realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 dan 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

• **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan yang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 18 Daftar Pendapatan Retribusi Jasa Umum**

| No | Uraian  | 2019                            |                  | %      | 2018             |
|----|---|---------------------------------|------------------|--------|------------------|
|    |   | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp)   |        | Realisasi (Rp)   |
| 1  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                 | 4.647.011.500,00                | 3.302.805.000,00 | 71,07  | 2.987.119.000,00 |
| 2  | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan    | 70.000.000,00                   | 79.800.000,00    | 114,14 | 74.100.000,00    |
| 3  | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 0,00                            | 0,00             | 0,00   | 580.000,00       |
| 4  | Retribusi Pelayanan Pasar                     | 2.487.368.000,00                | 1.895.399.950,00 | 68,71  | 1.707.542.800,00 |
| 5  | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor        | 62.840.000,00                   | 40.790.000,00    | 64,91  | 48.525.000,00    |
| 6  | Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang         | 13.370.000,00                   | 11.455.000,00    | 85,66  | 13.300.000,00    |
| 7  | Retribusi Pengendalian Menara                 | 120.000.000,00                  | 49.500.400,00    | 41,25  | 235.925.200,00   |

PER 31 DESEMBER 2015

| NO | NAMA PASAR                | PUTANG                |                         |                       |                       |                         |                         |                         | TOTAL PUTANG<br>SD 2015 | PENYISIHAN PUTANG       |                         |                         | JUMLAH |
|----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
|    |                           | 2012                  | 2013                    | 2014                  | 2015                  | 1-2 TABUNG              | 2-3 TABUNG              | 18                      |                         | 19                      |                         |                         |        |
| 1  | PASAR RALLA               | 1.307.000,00          |                         |                       |                       |                         |                         | 1.307.000,00            |                         |                         |                         | 1.307.000,00            |        |
| 2  | PASAR LISU                | 12.940.500,00         |                         |                       |                       |                         |                         | 12.940.500,00           |                         |                         |                         | 12.940.500,00           |        |
| 3  | PASAR PEKKAË              | 82.731.250,00         |                         |                       |                       |                         |                         | 82.731.250,00           |                         |                         |                         | 82.731.250,00           |        |
| 4  | PASAR MATTIROWALIE        | 62.070.000,00         |                         |                       |                       |                         |                         | 62.070.000,00           |                         |                         |                         | 62.070.000,00           |        |
| 5  | PASAR TAKKALASI           | 79.405.000,00         |                         |                       |                       |                         |                         | 79.405.000,00           |                         |                         |                         | 79.405.000,00           |        |
| 6  | PASAR MANGKOSO            | 44.545.000,00         |                         |                       |                       |                         |                         | 44.545.000,00           |                         |                         |                         | 44.545.000,00           |        |
| 7  | PASAR PALANRO             | 54.224.800,00         |                         |                       |                       |                         |                         | 54.224.800,00           |                         |                         |                         | 54.224.800,00           |        |
|    | <b>JUMLAH PUTANG 2012</b> | <b>337.233.500,00</b> |                         |                       |                       |                         |                         | <b>337.233.500,00</b>   |                         |                         |                         | <b>337.233.500,00</b>   |        |
| 1  | PASAR RALLA               |                       | 16.456.000,00           |                       |                       |                         |                         | 16.456.000,00           |                         |                         |                         | 16.456.000,00           |        |
| 2  | PASAR LISU                |                       | 306.436.500,00          |                       |                       |                         |                         | 306.436.500,00          |                         |                         |                         | 306.436.500,00          |        |
| 3  | PASAR PEKKAË              |                       | 119.269.050,00          |                       |                       |                         |                         | 119.269.050,00          |                         |                         |                         | 119.269.050,00          |        |
| 4  | PASAR MATTIROWALIE        |                       | 46.815.000,00           |                       |                       |                         |                         | 46.815.000,00           |                         |                         |                         | 46.815.000,00           |        |
| 5  | PASAR TAKKALASI           |                       | 62.584.250,00           |                       |                       |                         |                         | 62.584.250,00           |                         |                         |                         | 62.584.250,00           |        |
| 6  | PASAR MANGKOSO            |                       | 52.115.300,00           |                       |                       |                         |                         | 52.115.300,00           |                         |                         |                         | 52.115.300,00           |        |
| 7  | PASAR PALANRO             |                       | 603.676.100,00          |                       |                       |                         |                         | 603.676.100,00          |                         |                         |                         | 603.676.100,00          |        |
|    | <b>JUMLAH PUTANG 2013</b> |                       | <b>1.103.198.050,00</b> |                       |                       |                         |                         | <b>1.103.198.050,00</b> |                         |                         |                         | <b>1.103.198.050,00</b> |        |
| 1  | PASAR RALLA               |                       |                         | 28.535.000,00         |                       |                         |                         | 28.535.000,00           |                         |                         |                         | 28.535.000,00           |        |
| 2  | PASAR LISU                |                       |                         | 260.780.650,00        |                       |                         |                         | 260.780.650,00          |                         |                         |                         | 260.780.650,00          |        |
| 3  | PASAR PEKKAË              |                       |                         | 38.224.400,00         |                       |                         |                         | 38.224.400,00           |                         |                         |                         | 38.224.400,00           |        |
| 4  | PASAR MATTIROWALIE        |                       |                         | 25.160.000,00         |                       |                         |                         | 25.160.000,00           |                         |                         |                         | 25.160.000,00           |        |
| 5  | PASAR TAKKALASI           |                       |                         | 64.293.650,00         |                       |                         |                         | 64.293.650,00           |                         |                         |                         | 64.293.650,00           |        |
| 6  | PASAR MANGKOSO            |                       |                         | 82.428.250,00         |                       |                         |                         | 82.428.250,00           |                         |                         |                         | 82.428.250,00           |        |
| 7  | PASAR PALANRO             |                       |                         | 499.521.950,00        |                       |                         |                         | 499.521.950,00          |                         |                         |                         | 499.521.950,00          |        |
|    | <b>JUMLAH PUTANG 2014</b> |                       |                         | <b>889.053.200,00</b> |                       |                         |                         | <b>889.053.200,00</b>   |                         |                         |                         | <b>889.053.200,00</b>   |        |
|    | <b>JUMLAH PUTANG 2015</b> |                       |                         |                       | 889.053.200,00        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |        |
|    | <b>TOTAL PUTANG</b>       | <b>337.233.500,00</b> | <b>603.676.100,00</b>   | <b>499.521.950,00</b> | <b>889.053.200,00</b> | <b>1.103.198.050,00</b> | <b>1.103.198.050,00</b> | <b>337.233.500,00</b>   | <b>337.233.500,00</b>   | <b>1.103.198.050,00</b> | <b>1.103.198.050,00</b> | <b>2.329.474.800,00</b> |        |
|    |                           |                       |                         |                       |                       |                         |                         |                         |                         | 5%                      |                         |                         |        |
|    |                           |                       |                         |                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         | 10%                     |                         |        |
|    |                           |                       |                         |                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         | <b>33.723.305,00</b>    |        |
|    |                           |                       |                         |                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         | <b>3.249.497.240,00</b> |        |

PROSENTASE PENYISIHAN

NILAI PENYISIHAN

NILAI BERSIH PUTANG RETRIBUSI PASAR PER 31 DESEMBER 2015

**DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI RETRIBUSI PASAR  
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
PER 31 DESEMBER 2016**

| NO. DAFTAR PASAR     | PIUTANG          | REALISASI 2016   | SISA PIUTANG     |  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 2                    | 3                | 4                | 5                |  |
| <b>Desember 2012</b> |                  |                  |                  |  |
| LA                   | 1.307.000,00     | 1.307.000,00     |                  |  |
| KAFE                 | 1.940.500,00     |                  | 12.940.500,00    |  |
| TIROWALIH            | 8.773.125,00     | 381.250,00       | 82.350.000,00    |  |
| KALASI               | 62.070.000,00    | 3.302.500,00     | 58.767.500,00    |  |
| KOSONG               | 44.405.000,00    |                  | 79.405.000,00    |  |
| BARU                 | 44.545.000,00    |                  | 44.545.000,00    |  |
| PIUTANG 2012         | 84.224.800,00    | 1.990.750,00     | 332.232.800,00   |  |
| <b>Desember 2013</b> |                  |                  |                  |  |
| LA                   | 16.456.000,00    | 524.000,00       | 15.932.000,00    |  |
| KAFE                 | 306.436.500,00   | 4.542.000,00     | 301.894.500,00   |  |
| TIROWALIH            | 119.269.050,00   | 9.158.750,00     | 110.110.300,00   |  |
| KALASI               | 46.815.000,00    |                  | 46.815.000,00    |  |
| KOSONG               | 62.584.250,00    | 337.000,00       | 62.247.250,00    |  |
| BARU                 | 52.115.300,00    |                  | 52.115.300,00    |  |
| PIUTANG 2013         | 603.676.100,00   | 14.561.750,00    | 589.114.350,00   |  |
| <b>Desember 2014</b> |                  |                  |                  |  |
| LA                   | 28.535.000,00    | 72.000,00        | 28.463.000,00    |  |
| KAFE                 | 260.780.650,00   | 18.624.000,00    | 242.156.650,00   |  |
| TIROWALIH            | 38.324.400,00    | 80.000,00        | 38.244.400,00    |  |
| KALASI               | 25.160.000,00    |                  | 25.160.000,00    |  |
| KOSONG               | 64.293.650,00    | 973.000,00       | 63.320.650,00    |  |
| BARU                 | 82.428.250,00    |                  | 82.428.250,00    |  |
| PIUTANG 2014         | 499.521.950,00   | 19.749.000,00    | 479.772.950,00   |  |
| <b>Desember 2015</b> |                  |                  |                  |  |
| LA                   |                  | 11.098.000,00    |                  |  |
| KAFE                 |                  | 842.000,00       |                  |  |
| TIROWALIH            |                  | 106.763.000,00   |                  |  |
| KALASI               |                  | 26.607.900,00    |                  |  |
| KOSONG               |                  | 10.375.000,00    |                  |  |
| KOSONG               |                  | 20.910.400,00    |                  |  |
| BARU                 |                  | 51.810.500,00    |                  |  |
| PIUTANG 2015         | 889.053.200,00   | 228.406.800,00   | 660.646.400,00   |  |
| <b>Desember 2016</b> |                  |                  |                  |  |
| LA                   | 77.796.000,00    | 62.075.000,00    | 15.721.000,00    |  |
| KAFE                 | 53.016.000,00    | 38.520.000,00    | 14.496.000,00    |  |
| TIROWALIH            | 784.320.000,00   | 549.064.650,00   | 235.255.350,00   |  |
| KALASI               | 304.056.600,00   | 251.720.850,00   | 52.335.750,00    |  |
| KOSONG               | 335.160.000,00   | 29.885.000,00    | 305.275.000,00   |  |
| KOSONG               | 178.138.800,00   | 114.856.500,00   | 63.282.300,00    |  |
| BARU                 | 303.450.000,00   | 106.692.750,00   | 196.757.250,00   |  |
| PIUTANG 2016         | 2.035.937.400,00 | 1.152.814.750,00 | 883.122.650,00   |  |
| PIUTANG S/D 2016     | 4.365.412.200,00 | 1.420.523.050,00 | 2.944.889.150,00 |  |

Lampiran 2b

**DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI RETRIBUSI PASAR  
PEMBANTAR KABUPATEN BARITO  
P/R 31 DESEMBER 2017**

| NO | NAMA PASAR                    | PIUTANG                 | REALISASI 2017          | REMA PIUTANG            | KRY |
|----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 1  | 2                             | 3                       | 4                       | 5                       | 6   |
| 1  | PASAR RALLA                   |                         |                         |                         |     |
| 2  | PASAR LISU                    | 12.940.500,00           |                         | 12.940.500,00           |     |
| 3  | PASAR PEKKAJ                  | 82.350.000,00           |                         | 82.350.000,00           |     |
| 4  | PASAR MATTIROWALIH            | 58.767.500,00           |                         | 58.767.500,00           |     |
| 5  | PASAR TAKKALASI               | 79.405.000,00           |                         | 79.405.000,00           |     |
| 6  | PASAR MANGKOSO                | 44.545.000,00           |                         | 44.545.000,00           |     |
| 7  | PASAR PALANRO                 | 54.224.800,00           |                         | 54.224.800,00           |     |
|    | <b>JUMLAH PIUTANG 2013</b>    | <b>332.232.800,00</b>   |                         | <b>332.232.800,00</b>   |     |
| 1  | PASAR RALLA                   |                         |                         |                         |     |
| 2  | PASAR LISU                    | 15.932.000,00           |                         | 15.932.000,00           |     |
| 3  | PASAR PEKKAJ                  | 301.894.500,00          | 3.273.000,00            | 298.621.500,00          |     |
| 4  | PASAR MATTIROWALIH            | 110.110.300,00          |                         | 110.110.300,00          |     |
| 5  | PASAR TAKKALASI               | 46.815.000,00           |                         | 46.815.000,00           |     |
| 6  | PASAR MANGKOSO                | 62.247.250,00           |                         | 62.247.250,00           |     |
| 7  | PASAR PALANRO                 | 52.115.300,00           |                         | 52.115.300,00           |     |
|    | <b>JUMLAH PIUTANG 2013</b>    | <b>589.114.350,00</b>   | <b>3.273.000,00</b>     | <b>585.841.350,00</b>   |     |
| 1  | PASAR RALLA                   |                         |                         |                         |     |
| 2  | PASAR LISU                    | 28.463.000,00           |                         | 28.463.000,00           |     |
| 3  | PASAR PEKKAJ                  | 242.156.650,00          | 6.945.750,00            | 235.210.900,00          |     |
| 4  | PASAR MATTIROWALIH            | 38.244.400,00           |                         | 38.244.400,00           |     |
| 5  | PASAR TAKKALASI               | 25.160.000,00           |                         | 25.160.000,00           |     |
| 6  | PASAR MANGKOSO                | 62.320.650,00           | 540.000,00              | 62.780.650,00           |     |
| 7  | PASAR PALANRO                 | 82.428.250,00           |                         | 82.428.250,00           |     |
|    | <b>JUMLAH PIUTANG 2014</b>    | <b>679.772.950,00</b>   | <b>7.485.750,00</b>     | <b>672.287.200,00</b>   |     |
| 1  | PASAR RALLA                   |                         |                         |                         |     |
| 2  | PASAR LISU                    |                         |                         |                         |     |
| 3  | PASAR PEKKAJ                  |                         | 6.987.750,00            |                         |     |
| 4  | PASAR MATTIROWALIH            |                         |                         |                         |     |
| 5  | PASAR TAKKALASI               |                         | 1.250.000,00            |                         |     |
| 6  | PASAR MANGKOSO                |                         | 448.000,00              |                         |     |
| 7  | PASAR PALANRO                 |                         |                         |                         |     |
|    | <b>JUMLAH PIUTANG 2015</b>    | <b>668.646.400,00</b>   | <b>8.685.750,00</b>     | <b>651.960.650,00</b>   |     |
| 1  | PASAR RALLA                   | 15.721.000,00           | 7.553.000,00            | 8.168.000,00            |     |
| 2  | PASAR LISU                    | 14.496.000,00           |                         | 13.232.000,00           |     |
| 3  | PASAR PEKKAJ                  | 235.255.350,00          | 1.264.000,00            | 190.429.550,00          |     |
| 4  | PASAR MATTIROWALIH            | 52.335.750,00           | 44.825.800,00           | 27.396.750,00           |     |
| 5  | PASAR TAKKALASI               | 305.275.000,00          | 24.939.000,00           | 276.700.000,00          |     |
| 6  | PASAR MANGKOSO                | 63.282.300,00           | 28.575.000,00           | 46.330.750,00           |     |
| 7  | PASAR PALANRO                 | 196.757.250,00          | 16.951.550,00           | 184.089.750,00          |     |
|    | <b>JUMLAH PIUTANG 2016</b>    | <b>883.122.650,00</b>   | <b>136.775.850,00</b>   | <b>746.346.800,00</b>   |     |
| 1  | PASAR RALLA                   | 99.054.000,00           | 68.371.000,00           | 30.683.000,00           |     |
| 2  | PASAR LISU                    | 51.000.000,00           | 35.104.000,00           | 15.896.000,00           |     |
| 3  | PASAR PEKKAJ                  | 799.194.600,00          | 664.097.250,00          | 135.097.350,00          |     |
| 4  | PASAR MATTIROWALIH            | 307.338.600,00          | 291.439.850,00          | 15.898.750,00           |     |
| 5  | PASAR TAKKALASI               | 303.540.000,00          | 158.485.000,00          | 145.055.000,00          |     |
| 6  | PASAR MANGKOSO                | 174.322.800,00          | 115.408.350,00          | 58.914.450,00           |     |
| 7  | PASAR PALANRO                 | 276.045.000,00          | 181.786.000,00          | 94.259.000,00           |     |
|    | <b>JUMLAH PIUTANG 2017</b>    | <b>2.810.495.000,00</b> | <b>1.514.691.450,00</b> | <b>495.803.550,00</b>   |     |
|    | <b>TOTAL PIUTANG S/D 2017</b> | <b>4.955.384.150,00</b> | <b>1.670.911.800,00</b> | <b>3.284.472.350,00</b> |     |

PENERIMAN KABUPATEN BARRU  
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PASAR  
PER 31 OKTOBER 2019

Lampiran 8b1

| REALISASI PIUTANG |                    |                       |                                   |                       |     |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|
|                   | NAMA PASAR         | PIUTANG               | REALISASI S.D. 31<br>OKTOBER 2019 | SISA PIUTANG          | KBT |
|                   | 2                  | 3                     | 4                                 | 5                     | 6   |
| <b>TAHUN 2012</b> |                    |                       |                                   |                       |     |
| 1                 | PASAR RALLA        | -                     | -                                 | -                     | -   |
| 2                 | PASAR LISU         | 12.940.500,00         | -                                 | 12.940.500,00         | -   |
| 3                 | PASAR PEKKAE       | 82.350.000,00         | -                                 | 82.350.000,00         | -   |
| 4                 | PASAR MATTIROWALIE | 58.787.500,00         | -                                 | 58.787.500,00         | -   |
| 5                 | PASAR TAKKALASI    | 79.405.000,00         | -                                 | 79.405.000,00         | -   |
| 6                 | PASAR MANGKOSO     | 44.545.000,00         | -                                 | 44.545.000,00         | -   |
| 7                 | PASAR PALANRO      | 84.224.800,00         | -                                 | 84.224.800,00         | -   |
|                   | <b>JUMLAH</b>      | <b>332.232.800,00</b> | -                                 | <b>332.232.800,00</b> | -   |
| <b>TAHUN 2013</b> |                    |                       |                                   |                       |     |
| 1                 | PASAR RALLA        | -                     | -                                 | -                     | -   |
| 2                 | PASAR LISU         | 15.932.000,00         | -                                 | 15.932.000,00         | -   |
| 3                 | PASAR PEKKAE       | 298.621.500,00        | -                                 | 298.621.500,00        | -   |
| 4                 | PASAR MATTIROWALIE | 110.110.300,00        | -                                 | 110.110.300,00        | -   |
| 5                 | PASAR TAKKALASI    | 46.815.000,00         | -                                 | 46.815.000,00         | -   |
| 6                 | PASAR MANGKOSO     | 62.247.250,00         | -                                 | 62.247.250,00         | -   |
| 7                 | PASAR PALANRO      | 52.115.300,00         | -                                 | 52.115.300,00         | -   |
|                   | <b>JUMLAH</b>      | <b>688.841.350,00</b> | -                                 | <b>688.841.350,00</b> | -   |
| <b>TAHUN 2014</b> |                    |                       |                                   |                       |     |
| 1                 | PASAR RALLA        | -                     | -                                 | -                     | -   |
| 2                 | PASAR LISU         | 28.463.000,00         | -                                 | 28.463.000,00         | -   |
| 3                 | PASAR PEKKAE       | 231.206.900,00        | -                                 | 231.206.900,00        | -   |
| 4                 | PASAR MATTIROWALIE | 38.244.400,00         | -                                 | 38.244.400,00         | -   |
| 5                 | PASAR TAKKALASI    | 25.190.000,00         | -                                 | 25.190.000,00         | -   |
| 6                 | PASAR MANGKOSO     | 62.780.650,00         | -                                 | 62.780.650,00         | -   |
| 7                 | PASAR PALANRO      | 62.428.250,00         | -                                 | 62.428.250,00         | -   |
|                   | <b>JUMLAH</b>      | <b>468.285.200,00</b> | -                                 | <b>468.285.200,00</b> | -   |
| <b>TAHUN 2015</b> |                    |                       |                                   |                       |     |
| 1                 | PASAR RALLA        | 1.478.000,00          | -                                 | 1.478.000,00          | -   |
| 2                 | PASAR LISU         | 22.894.000,00         | -                                 | 22.894.000,00         | -   |
| 3                 | PASAR PEKKAE       | 141.084.900,00        | -                                 | 141.084.900,00        | -   |
| 4                 | PASAR MATTIROWALIE | 12.813.000,00         | -                                 | 12.813.000,00         | -   |
| 5                 | PASAR TAKKALASI    | 255.735.000,00        | -                                 | 255.735.000,00        | -   |
| 6                 | PASAR MANGKOSO     | 49.764.250,00         | -                                 | 49.764.250,00         | -   |
| 7                 | PASAR PALANRO      | 137.799.500,00        | -                                 | 137.799.500,00        | -   |
|                   | <b>JUMLAH</b>      | <b>621.919.850,00</b> | -                                 | <b>621.919.850,00</b> | -   |
| <b>TAHUN 2016</b> |                    |                       |                                   |                       |     |
| 1                 | PASAR RALLA        | 8.168.000,00          | -                                 | 8.168.000,00          | -   |
| 2                 | PASAR LISU         | 13.057.000,00         | -                                 | 13.057.000,00         | -   |
| 3                 | PASAR PEKKAE       | 190.428.800,00        | -                                 | 190.428.800,00        | -   |
| 4                 | PASAR MATTIROWALIE | 26.616.750,00         | -                                 | 26.616.750,00         | -   |
| 5                 | PASAR TAKKALASI    | 276.700.000,00        | -                                 | 276.700.000,00        | -   |
| 6                 | PASAR MANGKOSO     | 46.490.750,00         | 000.000,00                        | 44.890.750,00         | -   |
| 7                 | PASAR PALANRO      | 194.089.750,00        | -                                 | 194.089.750,00        | -   |
|                   | <b>JUMLAH</b>      | <b>744.650.050,00</b> | <b>000.000,00</b>                 | <b>743.650.050,00</b> | -   |
| <b>TAHUN 2017</b> |                    |                       |                                   |                       |     |
| 1                 | PASAR RALLA        | 17.216.000,00         | -                                 | 17.216.000,00         | -   |
| 2                 | PASAR LISU         | 7.793.000,00          | -                                 | 7.793.000,00          | -   |



**Foto dokumentasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Barru**